

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat LRMPHP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. LRMPHP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. LPP-MPHP mempunyai tugas melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

Untuk mewujudkan tugas di atas, LRMPHP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama Riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada tahun 2025, jumlah pegawai di LRMPHP sebanyak 22 pegawai yang terdiri dari 19 orang PNS dan 3 orang PPPK. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang fungsional Instruktur PNS, 1 orang Fungsional Analisis SDMAO, 2 orang Fungsional Keuangan, 1 orang Perencana, dan 9 orang Fungsional Umum PNS. Selain itu, terdapat penyedia jasa lainnya perorangan yang di singkat PJLP sebanyak 11 orang ditugaskan membantu kegiatan perkantoran yang tersebar di petugas kebersihan, dan petugas keamanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Riset Mekanisasi

Pengolahan Hasil Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan
n-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada pelaksanaan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, LRMPHP melakukan 11 (Sebelas) kali revisi DIPA dengan alasan/pertimbangan tertentu (Tabel 4).

Tabel 4. Daftar Revisi Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tanggal DIPA	Total PAGU (Rp)	Total Blokir (Rp)	Kode Digital Stamp	Kategori Revisi	Keterangan Revisi
1	DIPA Petikan Awal	2-Dec-24	4.488.849.000	0	DS:5197-1382-7670-5569		DIPA Pertama
2	DIPA Petikan Revisi 01	21-Feb-25	4.488.849.000	931.424.000	DS:2905-1979-0525-2899	Revisi DJA	Kebijakan blokir anggaran
3	DIPA Petikan Revisi 02	9-Apr-25	4.488.849.000	909.224.000	DS:3942-1844-8092-0196	Revisi DJA	Kebijakan buka blokir anggaran daya dan jasa
4	DIPA Petikan Revisi 03	23-Apr-25	4.488.849.000	909.224.000	DS:3942-1844-8092-0196	Revisi Kanwil DJPb	Update revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA
5	DIPA Petikan Revisi 04	14-Jul-25	4.488.849.000	909.224.000	DS:3942-1844-8092-0196	Revisi Kanwil DJPb	Revisi pemutakhiran revisi POK dan penyesuaian hal III DIPA
6	DIPA Petikan Revisi 05	1-Sept-25	3.579.625.000		DS: 1719-1518-1138-0222	Revisi Kanwil DJPb	Revisi pengalihan blokir anggaran dan penyesuaian hal III DIPA
7	DIPA Petikan Revisi 06	14-Oct-25	3.579.625.000		DS: 1719-1518-1138-0222	Revisi Kanwil DJPb	revisi pemutakhiran revisi POK dan penyesuaian hal III DIPA
8	DIPA Petikan Revisi 07	13-Nov-25	3.579.625.000		DS: 1719-1518-1138-0222	Revisi Kanwil DJPb	Revisi pemutakhiran revisi POK pengalokasian gaji PPPK
9	DIPA Petikan Revisi 08	19-Nov-25	3.649.613.000		DS: 7785-9708-0170-6318	Revisi Kanwil DJPb	Revisi penambahan pagu belanja pegawai
10	DIPA Petikan Revisi 09	28-Nov-25	3.649.613.000		DS:7785-9708-0170-6318	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran Revisi KPA
11	DIPA Petikan Revisi 10	12-Dec-25	3.649.613.000		DS:7785-9708-0170-6318	Revisi Kanwil DJPb	Pemutakhiran Revisi KPA
12	DIPA Petikan Revisi 11	12-Dec-25	3.649.613.000		DS: 7785-9708-0170-6318	Revisi Kanwil DJPb	Revisi pemutakhiran hasil revisi POK/KPA

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan Rp0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.416.975,- dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,- (Tabel 5). Pendapatan di lingkup LRMPHP berasal dari Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP).

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Belanja Barang Sisa Hasil Riset		3.358.000	
Pendapatan Lain-lain - Pengembalian tunjangan		58.975	
Jumlah	-	3.416.975	

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.416.975,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,- (Tabel 6). Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat hasil penjualan barang sisa kegiatan riset dan pengembalian tunjangan pegawai.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan belanja barang sisa hasil riset	3.358.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain - Pengembalian tunjangan	58.975	-	#DIV/0!
Jumlah	3.416.975	-	#DIV/0!

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Negara
Rp3.612.489.800,-

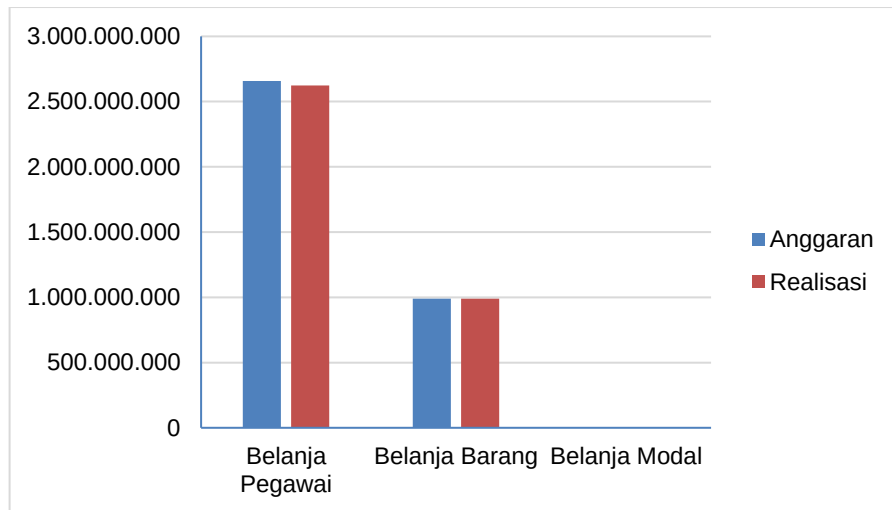
Realisasi belanja Kantor LRMPHP pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.612.489.800,- atau sebesar 98,98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.649.613.000,- (Tabel 7).

Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA. 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.658.837.000	2.623.049.598	98,65
Belanja Barang	990.776.000	989.440.202	99,87
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	3.649.613.000	3.612.489.800	98,98
Pengembalian			-
Jumlah	3.649.613.000	3.612.489.800	98,98

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp35.787.402 (selisih antara anggaran dan realisasi). Hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang tidak terserap. Tingkat penyerapan yang tinggi menunjukkan kebutuhan operasional barang telah terpenuhi sesuai rencana.

Seluruh alokasi anggaran telah digunakan sesuai peruntukan, tanpa adanya dana yang harus dikembalikan ke kas negara. Sehingga pelaksanaan anggaran dapat dikatakan efektif, efisien, dan sesuai rencana.



Gambar 1. Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA. 2025

Tahun 2025 menunjukkan penurunan total belanja sebesar 15,93% dibandingkan tahun 2024. Belanja pegawai meningkat 7,75%, menandakan fokus pada penguatan SDM yaitu Penambahan pegawai PPPK pada bulan Oktober 2025 sebanyak 3 orang, serta mutasi masuk 1 orang PNS pada bulan Juli 2025. Belanja barang turun drastis 46,88%, dikarenakan adanya blokir pagu belanja barang dari pusat sehingga pagu anggaran belanja barang turun drastis (Tabel 8).

Tabel 8. Perbandingan realisasi belanja TA. 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.623.049.598	2.434.365.814	7,75
Belanja Barang	989.440.202	1.862.698.151	(46,88)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.612.489.800	4.297.063.965	(15,93)

Belanja Pegawai
Rp2.434.365.814,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.623.049.598,- dan Rp2.434.365.814,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.145.266.000	1.099.588.278	4,15%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)	1.238.630.620	1.193.274.536	3,80%
Uang makan PNS	147.510.000	136.461.000	8,10%
Belanja Lembur PNS	15.584.000	5.042.000	209,08
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	34.631.025	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus) PPPK	34.793.953	-	
Uang makan PPPK	6.634.000	-	
Jumlah Belanja Kotor	2.623.049.598	2.434.365.814	7,75%

Realisasi belanja pegawai TA. 2025 dan 2024 menunjukkan kenaikan sebesar **7,75%** dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 6). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah pegawai maupun peningkatan kesejahteraan melalui gaji dan tunjangan. Penambahan pegawai PPPK pada bulan Oktober 2025 sebanyak 3 orang serta mutasi masuk 1 orang PNS pada bulan Juli 2025 mempengaruhi peningkatan realisasi belanja gaji. Tidak terdapat pengembalian belanja pegawai hingga 31 Desember 2025.

Belanja Barang
Rp989.440.202,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp989.440.202,- dan Rp1.862.698.151,-. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan Realisasi Belanja Barang sebesar 46,88% dibandingkan dengan TA 2024, hal ini antara lain disebabkan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian terhadap prioritas program kerja yang lebih selektif dan terukur, serta kemungkinan adanya perubahan dalam strategi pelaksanaan kegiatan di lingkungan organisasi

Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang TA. 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	224.308.681	396.938.986	(43,49)
Belanja Barang Non Operasional	397.240	93.019.223	(99,57)
Belanja Jasa	599.614.278	650.624.772	(7,84)
Belanja Pemeliharaan	142.188.203	563.112.844	(74,75)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.947.000	144.010.726	(88,23)
Belanja Persediaan	5.984.800	14.991.600	(60,08)
Jumlah Belanja Kotor	989.440.202	1.862.698.151	(46,88)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	989.440.202	1.862.698.151	(46,88)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal tanah TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan untuk tanah LRMPHP, Tanah seluas 4746 m² yang terletak di Jalan Imogiri Barat Km 11.5, Sumberagung, Jetis, Bantul merupakan tanah yang dimiliki oleh keraton Yogyakarta yang dipinjam pakai untuk pembangunan gedung LRMPHP dengan masa pinjam pakai (Surat Perjanjian Nomor 007.B/HT/KPK/2012 tanggal 25 Januari 2012).

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0,- tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan TA 2024 yaitu sebesar Rp0,-. Hal ini disebabkan karena dari Tahun 2024 hingga 2025 Loka tidak mendapatkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0		0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Realisasi belanja gedung dan bangunan TA. 2025 maupun TA. 2024 karena tidak mendapatkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan (Tabel 12).

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA. 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor			#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak ada Realisasi TA 2024 pada belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-0. Tidak ada Realisasi TA 2025 pada belanja modal Lainnya.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-0. Tidak ada Realisasi TA 2025 pada belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,- merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Jumlah TUP Rp.0,- dan UP tunai Rp.0,-. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2025	2024
BNI Trikora Nomor VA	-	-
Kuitansi yang belum di-SP2D-kan	-	-
Kas di Pemegang Uang Muka Kerja (Persekot)	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan
Pajak Rp22.354,-

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.354,- dan Rp58.975,- yang semuanya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu, dan untuk tahun 2025 terdapat pengembalian potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2025 untuk 3 (Tiga) Pegawai an. Gilang Ramadan, Tri Handanari dan Rinto Pujatmoko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Piutang bukan pajak TA. 2025 dan 2024

Rincian	2025	2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	22.354	58.975

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp112

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 adalah sebesar masing-masing Rp112,- dan Rp295 (Tabel 15). Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar ditentukan oleh kualitas piutang.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA. 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak		-	-
Lancar	22.354	0,5%	112
Kurang Lancar			
Diragukan			-
Jumlah	22.354	0	112

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,-

C.2 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan hak

pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA. 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Pengembalian Tunjangan Kinerja		-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Kas lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan tercantum pada Tabel 17.

Tabel 17. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2025	2024
Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember	0	0
Pajak PPh yang belum disetor	0	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	0	0
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp3.077.600,-

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.077.600,- dan Rp4.741.600,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Tabel 18.

Tabel 18. Rincian Persediaan TA. 2025 dan 2024

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi	3.077.600	4.741.600
Barang untuk Pemeliharaan		-
Persediaan Lainnya		-
Bahan Baku	-	
Jumlah	3.077.600	4.741.600

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Penurunan nilai persediaan Barang Konsumsi ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, antara lain:

- Efisiensi dalam penggunaan barang konsumsi selama tahun berjalan.
- Penyesuaian volume pengadaan berdasarkan kebutuhan aktual.
- Kebijakan pengendalian persediaan untuk mengurangi potensi pemborosan atau penumpukan barang.

Secara keseluruhan, tren penurunan nilai persediaan menunjukkan adanya pengelolaan yang lebih selektif dan efisien terhadap aset lancar, sejalan dengan upaya optimalisasi anggaran dan peningkatan efektivitas operasional.

Tanah
Rp0

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki LRMPHP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai aset tetap Tanah tidak berubah karena tanah yang ditempati merupakan tanah milik Keraton Yogyakarta. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Tabel 20. Rincian Tanah LRMPHP

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	4746 M2	Jl. Imogiri Barat Km. 11,5 Jetis Pleret Bantul D.I Yogyakarta	Rp -

Tanah seluas 4746 m² yang terletak di Jalan Imogiri Barat Km 11.5, Sumberagung, Jetis, Bantul merupakan tanah yang dimiliki oleh keraton Yogyakarta yang dipinjam pakai untuk pembangunan gedung LRMPHP dengan masa pinjam pakai (Surat Perjanjian Nomor 007.B/HT/KPK/2012 tanggal 25 Januari 2012)

Peralatan dan
Mesin
Rp3.953.180.295,-

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.3.953.180.295,- dan Rp.3.953.180.295,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan pada Tabel 21. Tidak Terdapat mutasi tambah dari transaksi pada tahun anggaran 2025.

Tabel 21. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.953.180.295
Mutasi tambah:	
Transaksi Saldo awal	0
Transfer masuk	0
-	0
Mutasi kurang:	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.953.180.295
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	-Rp3.935.371.545
Nilai Buku per 31 Desember 2025	17.808.750

Gedung dan
Bangunan
Rp6.644.882.000,-

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.6.644.882.000,- dan Rp.6.644.882.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan tercantum pada Tabel 22. Tidak Terdapat mutasi dan transaksi pada tahun anggaran 2025 dari Beban Gedung dan Bangunan

Tabel 22. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	6.644.882.000
Mutasi tambah:	-
Transfer masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	6.644.882.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.251.689.083)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.393.192.917

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp601.208.000,-

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.601.208.000,- dan Rp.601.208.000,- Tidak terdapat mutasi dan transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan (Tabel 23).

Tabel 23. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	601.208.000
Mutasi tambah:	-
Transfer masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	601.208.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(571.097.317)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.110.683

Aset Lainnya
Rp1.321.293.698,-

C.9 Aset Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.321.293.698,- dan Rp1.321.293.698,-. Tidak Terdapat mutasi dan transaksi pada tahun anggaran 2025 (Tabel 24).

Tabel 24. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap

Saldo per 1 Januari 2025	1.321.293.698
Mutasi tambah:	
Koreksi perubahan nilai	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.321.293.698
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(985.455.397)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	335.838.301

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.10 Konstruksi dalam Pengembangan

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja. Tidak Terdapat mutasi dan transaksi pada tahun anggaran 2025

Tabel 25. Mutasi transaksi konstruksi dalam pengerjaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(5.758.157.945)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(5.758.157.945) dan Rp(5.420.649.462). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Persediaan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.953.180.295	3.935.371.545	17.808.750
2	Gedung dan Bangunan	6.644.882.000	1.251.689.083	5.393.192.917
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	601.208.000	571.097.317	30.110.683
Akumulasi Penyusutan		11.199.270.295	5.758.157.945	5.441.112.350

Aset Tak Berwujud
Rp1.321.293.698,-

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.321.293.698,- dan Rp1.321.293.698,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada LRMPHP berupa Paten serta rekomtek hasil kajian. Tercatat 6 paten (4 paten sederhana dan 2 paten biasa) dihasilkan dari Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 (Gambar 2). Untuk Tahun Anggaran 2025 belum ada pengajuan penghapusan aset tak berwujud berupa paten maupun rekomtek dikarenakan masih berlaku umur hak patennya. Untuk protipe hasil penelitian yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga tidak memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan tercantum pada Tabel 27. Tidak Terdapat mutasi dan transaksi pada tahun anggaran 2025

Tabel 27. Transaksi terhadap Aset Tak Berwujud

Saldo per 1 Januari 2025		1.321.293.698
Mutasi tambah:		
Koreksi perubahan nilai		-
Mutasi kurang:		
Koreksi pencatatan		-
Saldo per 31 Desember 2025		1.321.293.698
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(985.455.397)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		335.838.301

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Kondisi (B/RR/RB)
1	8010101005	Paten sederhana	AL-TIS	2014	1	192.775.935	192.775.935	B
2	8010101013	Paten Biasa	Proses pembuatan pupuk	2016	1	347.507.397	347.507.397	B
3	8010101005	Paten sederhana	alat pengaduk pada mesin	2016	1	243.273.593	243.273.593	B
4	8010101005	Paten sederhana	alat pengukus fish jelly	2016	1	194.625.583	194.625.583	B
5	8010101013	Paten Biasa	Proses peng. kesegaran ikan	2017	1	213.427.430	213.427.430	B
6	8010101005	Paten sederhana	Konverter Kit	2018	1	129.683.760	129.683.760	B
				Jumlah	6	1.321.293.698	1.321.293.698	

Gambar 2. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

C.13 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp0,-

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak Terdapat mutasi dan transaksi pada tahun anggaran 2025

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Selama 2025 ini, Uang Muka dari KPPN berupa UP tunai senilai Rp.60.000.000,-.

Utang kepada pihak
ketiga Rp.0

C.15 Utang dari Pihak ketiga

Nilai utang dari pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian utang pihak ketiga pada lingkup LRMPHP per tanggal pelaporan tercantum pada Tabel 28.

Tabel 28. rincian utang pihak ketiga pada lingkup LRMPHP

No	Uraian	Nilai
1		
Jumlah		0

Ekuitas
Rp.5.769.979.678,-

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.769.979.678,- dan Rp6.071.876.261,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNPB
Rp3.358.000,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.358.000,- dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 29. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TH. 2025	TH. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Giro	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	3.358.000	-	#DIV/0!
Jumlah	3.358.000	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2025. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di TA 2025 berasal dari penjualan barang sisa hasil riset LRMPHP.

Beban Pegawai
Rp2.434.365.814,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2.623.086.219,- dan Rp2.434.365.814,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terjadi kenaikan pada beban pegawai di TA 2025 sebesar 7,75% dibandingkan TA 2024. Ini disebabkan karena penambahan pegawai PPPK pada bulan Oktober 2025 sebanyak 3 orang, serta mutasi masuk 1 orang PNS pada bulan Juli 2025.

Tabel 30. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 & 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	930.398.065	864.140.100	7,67%
Beban Tunjangan-Tunjangan	249.499.048	235.389.203	5,99%
Belanja Lembur	15.584.000	5.042.000	209,08%
Beban Uang Makan	154.144.000	136.461.000	12,96%
Beban Tunjangan Khusus / Kegiatan	1.273.424.573	1.193.274.536	6,72%
Jumlah	2.623.049.686	2.434.306.839	7,75%

Beban Persediaan
Rp7.648.800,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.648.800,- dan Rp13.649.600,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terjadi penurunan pada beban persediaan di TA 2024 sebesar 43,96 persen. Ini disebabkan karena anggaran belanja barang persediaan TA 2025 lebih kecil daripada TA 2024. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Tabel 3.

Tabel 31. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 & 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7.648.800	13.649.600	-43,96%
Beban Persediaan bahan baku	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	7.648.800	13.649.600	-43,96%

Beban barang dan
Jasa
Rp834.691.014,-

D.4 Beban barang dan Jasa

Jumlah Beban barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp834.691.014,- dan Rp1.232.877.596,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban barang dan Jasa per 31 Desember 2025 & 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	145.409.441	291.608.953	-50,14%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	869.800	959.800	-9,38%
Beban Honor Operasional Satker	56.920.000	45.048.000	26,35%
Beban Barang Operasional Lainnya	21.109.440	59.322.233	-64,42%
Beban bahan	397.240	5.614.210	-92,92%
Beban Honor output Kegiatan	0	8.160.000	-100,00%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	42.878.000	-100,00%
Beban Peralatan & Mesin - Ekstrakomptabel	0	36.367.013	-100,00%
Beban Langganan Listrik	130.741.261	191.737.277	-31,81%
Beban Langganan Telepon	7.005.593	6.514.592	7,54%
Beban Langganan daya	81.211.530	77.400.000	4,92%
Beban Sewa	30.095.200	30.452.903	-1,17%
Beban Jasa Lainnya	360.931.509	344.520.000	4,76%
Jumlah	834.691.014	1.140.582.981	27,42%

Beban
Pemeliharaan
Rp142.188.203,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp142.188.203,- dan Rp563.112.844,-. Terjadi penurunan belanja beban pemeliharaan TA 2025 sebesar 59,02% jika dibandingkan dengan belanja beban pemeliharaan pada periode TA 2024 (Tabel

5). Hal ini disebabkan anggaran TA 2025 yang lebih kecil daripada TA 2024 karena adanya blokir anggaran dari pusat. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 33. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 & 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.643.750	338.226.646	-82,07%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.544.453	223.254.698	-63,47%
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	1.631.500	-100,00%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	142.188.203	563.112.844	59,02%

*Beban Perjalanan Dinas
Rp16.947.000,-*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.974.000,- dan Rp144.010.726,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 & 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	16.947.000	139.540.726	-87,86%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4.470.000	-100,00%
Beban Perjalanan dinas paket meeting luar kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	16.947.000	144.010.726	-88,23%

*Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
Rp0,-*

D.7. Beban Barang Untuk diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Tidak terdapat transaksi pada tahun anggaran 2025

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp290.125.339,-*

D.8 Beban, Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp290.125.339,- dan Rp194.412.017,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tercantum pada Tabel 35.

Tabel 35. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember
TA. 2025 & 2024

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.530.160	33.346.470	-32,44%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.715.082	73.357.541	100,00%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	36.075.052	35.668.151	1,14%
Beban Amortisasi Paten	84.805.036	52.039.855	62,96%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	#DIV/0!
Jumlah	290.125.330	194.412.017	49,23%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6.071.876.261,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.071.876.261,- dan Rp6.430.278.306,-

Defisit LO
Rp(3,914,686,383),-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp(3,914,686,383),-** dan **Rp (4.664.666.010),-** Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak kumulatif
Perubahan Rp0,-

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Nilai transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- dan Rp0,-

Penyesuaian nilai
aset Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 (Tabel 36).

Tabel 1. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0,-

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi atas reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi

masuk dan keluar BMN dari aplikasi persediaan dan aplikasi SIMAK BMN (SAKTI)
Rincian Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Koreksi atas reklasifikasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi atas reklasifikasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 4. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 desember 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp3.609.072.825,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.609.072.825,- dan Rp4.306.263.965,- Rincian Transaksi antar entitas terdiri dari

Tabel 5. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	3.609.072.825
Diterima dari entitas lain	-
Transfer masuk	-
Transfer keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.609.072.825

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp0,-

Ekuitas Akhir
Rp5.769.679.678,-

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.769.679.678,- dan Rp6.071.876.261,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Neraca.

F.2 Pengungkapan Lain

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan Perikanan

Satuan Kerja : Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Fungsi : 04. Ekonomi

Sub Fungsi : 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Program : 032.12.WA. Program Dukungan Manajemen

Lokasi : 0400. KPPN Yogyakarta

Kode	Kegiatan	Belanja		Output		
		Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Satuan
032. 12. WA	Program Dukungan Manajemen	3.649.613.000	3.612.489.888			
2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.649.613.000	3.612.489.888			
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.648.813.000	3.611.690.238	3.0	3.0	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
2378.EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	205.000	197.590	1.0	1.0	Layanan
2378.EBA. 962	Layanan Umum	16.362.000	16.347.000	1.0	1.0	Layanan
2378.EBA. 994	Layanan Perkantoran	3.632.246.000	3.595.145.648	1.0	1.0	Layanan
2378.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200.000	200.000	1.0	1.0	Orang, Layanan, Rekomendasi
2378.EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	200.000	200.000	1.0	1.0	Layanan
2378.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	600.000	599.650	3.0	3.0	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
2378.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	200.000	200.000	1.0	1.0	Dokumen
2378.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	200.000	199.650	1.0	1.0	Dokumen
2378.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	200.000	200.000	1.0	1.0	Dokumen

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 403834

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 14/01/26 10:03 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	3,416,975	3,416,975	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,416,975	3,416,975	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	3,416,975	3,416,975	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,649,613,000	3,612,489,800	(37,123,200)	98.98	4,436,931,000	4,297,063,965	(139,867,035)	96.85
1. Belanja Pegawai	2,658,837,000	2,623,049,598	(35,787,402)	98.65	2,443,849,000	2,434,365,814	(9,483,186)	99.61
2. Belanja Barang	990,776,000	989,440,202	(1,335,798)	99.87	1,993,082,000	1,862,698,151	(130,383,849)	93.46
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 403834

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 14/01/26 10:03 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,649,613,000	3,612,489,800	(37,123,200)	98.98	4,436,931,000	4,297,063,965	(139,867,035)	96.85
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

BANTUL, 14 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KARTIKA WINTA APRILIANY
Pembina - IV/a 198304172009012002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 10:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	22,354	58,975	(36,621)	(62.10)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(112)	(295)	183	(62.03)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	22,242	58,680	(36,438)	(62.10)
Persediaan	3,077,600	4,741,600	(1,664,000)	(35.09)
JUMLAH ASET LANCAR	3,099,842	4,800,280	(1,700,438)	(35.42)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,953,180,295	3,953,180,295	0	0.00
Gedung dan Bangunan	6,644,882,000	6,644,882,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	601,208,000	601,208,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,758,157,945)	(5,552,837,651)	(205,320,294)	3.70
JUMLAH ASET TETAP	5,441,112,350	5,646,432,644	(205,320,294)	(3.64)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,321,293,698	1,321,293,698	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(985,455,397)	(900,650,361)	(84,805,036)	9.42
JUMLAH ASET LAINNYA	335,838,301	420,643,337	(84,805,036)	(20.16)
JUMLAH ASET	5,780,050,493	6,071,876,261	(291,825,768)	(4.81)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,370,815	0	10,370,815	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,370,815	0	10,370,815	
JUMLAH KEWAJIBAN	10,370,815	0	10,370,815	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,769,679,678	6,071,876,261	(302,196,583)	(4.98)
JUMLAH EKUITAS	5,769,679,678	6,071,876,261	(302,196,583)	(4.98)
JUMLAH EKUITAS	5,769,679,678	6,071,876,261	(302,196,583)	(4.98)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,780,050,493	6,071,876,261	(291,825,768)	(4.81)

Keterangan :

FINAL

BANTUL, 14 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KARTIKA WINTA APRILIANY
Pembina - IV/a 198304172009012002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM
Tgl Cetak : 14/01/26 10:00 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,358,000	0	3,358,000	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,358,000	0	3,358,000	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,358,000	0	3,358,000	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,623,086,219	2,434,306,839	188,779,380	7.755
Beban Persediaan	7,648,800	13,649,600	(6,000,800)	(43.963)
Beban Barang dan Jasa	834,691,014	1,140,582,981	(305,891,967)	(26.819)
Beban Pemeliharaan	142,188,203	563,112,844	(420,924,641)	(74.75)
Beban Perjalanan Dinas	16,947,000	144,010,726	(127,063,726)	(88.232)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 10:00 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	290,125,330	369,002,725	(78,877,395)	(21.376)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(183)	295	(478)	(162.034)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,914,686,383	4,664,666,010	(749,979,627)	(16.078)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,911,328,383)	(4,664,666,010)	753,337,627	(16.15)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,975	0	58,975	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58,975	0	58,975	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	58,975	0	58,975	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,911,269,408)	(4,664,666,010)	753,396,602	(16.151)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,911,269,408)	(4,664,666,010)	753,396,602	(16.151)

Keterangan :
FINAL

BANTUL, 14 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KARTIKA WINTA APRILIANY
Pembina - IV/a 198304172009012002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 6:33 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 10:02 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,071,876,261	6,430,278,306	(358,402,045)	(5.57)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,911,269,408)	(4,664,666,010)	753,396,602	(16.15)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,609,072,825	4,306,263,965	(697,191,140)	(16.19)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(302,196,583)	(358,402,045)	56,205,462	(15.68)
EKUITAS AKHIR	5,769,679,678	6,071,876,261	(302,196,583)	(4.98)

Keterangan :

FINAL

BANTUL, 14 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KARTIKA WINTA APRILIANY

Pembina - IV/a 198304172009012002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 10:06 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	22,354	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	112
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,077,600	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,953,180,295	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,644,882,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	601,208,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,935,371,545
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,251,689,083
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	571,097,317
0.0	162141	Paten	1,321,293,698	0
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	985,455,397
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	10,370,815
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,612,489,800
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,416,975	0
0.0	391111	Ekuitas	0	6,071,876,261
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	58,975
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,358,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	903,620,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,024	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62,340,590	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,437,290	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	72,520,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,566,336	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	49,462,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	147,510,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24,745,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	26,763,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	453	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,676,360	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	535,272	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,620,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,955,340	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,634,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,080,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	15,584,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,667,241	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	34,793,953	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (403834) LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Tgl Data : 14/01/26 7:40 AM

Tgl Cetak : 14/01/26 10:06 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	145,409,441	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	869,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,920,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,109,440	0
3.0	521211	Beban Bahan	397,240	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	130,741,261	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,005,593	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81,211,530	0
3.0	522141	Beban Sewa	30,095,200	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	360,931,509	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,643,750	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,544,453	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,947,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22,530,160	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146,715,082	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36,075,052	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	84,805,036	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,648,800	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	183
JUMLAH			16,441,767,488	16,441,767,488

Keterangan :

FINAL

BANTUL, 14 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KARTIKA WINTA APRILIANY

Pembina - IV/a 198304172009012002